

## Wakil Bupati Sabu Raijua Johanis Uly Kae, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib 3E

PROKOPIM, Wakil Bupati Sabu Raijua yang didampingi Sekretaris Daerah Sabu Raijua, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT (Ibu Japlina VB. Lay,SH) dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua membuka Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG di Aula Kantor Bupati Sabu Raijua, Selasa 26 September 2023. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Para Pimpinan OPD atau Staf yang mewakili dan Para Peserta Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.



Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman teknis tatacara penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap Sumber Daya, Partisipasi dan mempunyai Kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Saya mengucapkan terimakasih kepada Narasumber yang sudah berkenan hadir untuk menyampaikan materi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Sabu Raijua.



Sebelum mengakhiri sambutannya Wakil Bupati Sabu Raijua mengatakan saya mengajak kita semua untuk mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.